

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN IDE DALAM KEBIJAKAN  
KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI GOLKAR**

**ABUL HARIS SURYO NEGORO\***

Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
\*Email: suryonegoro82@gmail.com

**ABSTRAK**

**Partai mengorganisir partisipasi politik masyarakat dalam rangka memenuhi aspirasi. Stabilitas partai, kekuasaan partai dan sistem partai sangat bergantung pada tingkat institusi dan keikutsertaannya. Partisipasi luas yang dikolaborasikan oleh rendahnya tingkat lembaga partai politik akan menghasilkan partai anomik dan kekerasan. Kontras, partisipasi tingkat rendah cenderung membuat partai politik lemah berhadapan dengan peraturan politik dan jumlah kekuatan sosial lainnya. Konvensi menjadi strategi baru di Indonesia. Hal itu terjadi karena beberapa partai politik di Indonesia cenderung memberi peluang calon presiden kepada pimpinan mereka. Paradigma partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa ketua adalah calon presiden. Respon dan antusiasme masyarakat terhadap konvensi sebagai gagasan baru yang berorientasi pada demokrasi. Hal ini dapat ditunjukkan oleh jumlah orang yang mendaftar sebagai peserta konvensi. Ini menggambarkan bahwa ide konvensi sukses dan memberdayakan partai untuk memenangkan pemilihan di tahun 2004.**

**Kata Kunci: Partai Golkar, Calon Presiden Konvensi, Kekuatan Gagasan**

## I. PENDAHULUAN

Partai Golongan Karya (Golkar) dengan paradigma barunya, melakukan penyusunan strategi untuk pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu). Setiap partai didirikan untuk menjamin terlaksananya suatu tujuan. Namun, ketika tujuan tersebut telah tercapai seperti menjadi partai besar, menjadi peserta Pemilu, mendapatkan kursi dan menjadi anggota parlemen. Partai berhak dan berkemampuan menentukan tujuannya sendiri. Kepentingan massa menjadi sesuatu yang hilang rupa, tanpa bentuk, tidak jelas apa yang diinginkan dan dengan demikian bisa ditinggalkan begitu saja. Karena kehendak bersama itu tidak bisa dirumuskan menjadi sesuatu yang bisa menjadi tunturan sosial dan politik maka sekali partai mampu merumuskannya rumusan itu menjadi rumusannya sendiri. Suatu partai mampu merumuskan *general will* itu semakin dia menjadi dirinya sendiri, tanpa kontak dengan massa, semakin tinggi tingkat keterpisahannya dari massa. Biasanya hal itu diiringi pula oleh

proses birokratisasi didalam partai tersebut (Dhakidae, 2004:14).

Partai mengorganisir partisipasi politik masyarakat agar sesuai dengan aspirasinya. Stabilitas, kekokohan partai dan sistem kepartaian sangat tergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi berskala luas yang dibarengi derajat rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik yang berorientasi konflik dan kekerasan. Sebaliknya, derajat partisipasi yang rendah cenderung memperlemah partai politik vis-à-vis pranata politik yang lain dan sejumlah kekuatan sosial. Kepentingan pimpinan partai politik untuk memperluas peran serta politik, sejauh mereka mampu mengorganisasikan partisipasi itu dalam kerangka kerja struktur partai mereka. Partai politik yang bersandar pada dukungan massal jauh lebih kokoh dibandingkan dengan sistem kepartaian yang kenaikan partisipasi politiknya selalu mengarah kepada pemisahan gradual organisasi partai dari para pendukungnya dan korversi atas apa yang sebelumnya pernah

menjadi landasan luas organisasi .ke dalam segelintir politisi yang tidak mengakar (Huntington, 2003: 477).

Sebagai kekuatan politik yang pernah menjadi bagian penting kekuasaan rezim Orde Baru, pada awal Era Reformasi Golkar yang kemudian *bermetamorfose* menjadi Partai Golkar mengalami banyak tekanan dan hujatan dari masyarakat. Golkar dicitrakan sebagai “partai politik” yang identik dengan Orde Baru, bahkan sebagai kekuatan utama yang paling bertanggungjawab atas krisis multidimensi di Indonesia pasca Orde Baru. Karena itu Partai Golkar perlu mengambil langkah-langkah penting dalam rangka memulihkan citranya dimata publik. Dalam rangka memperoleh dukungan rakyat ditengah menguatnya gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa pada tahun 1997-1998 dengan puncaknya ditandai dengan pengunduran diri Jenderal Besar Soeharto sebagai Presiden RI, mendorong Golkar melakukan langkah-langkah reformasi atau pembaruan dalam tubuh organisasinya.

Langkah strategis yang diambil Partai Golkar agar tetap eksis dan *survive* adalah melakukan reformasi internal dengan melakukan reformasi struktur dan kultur politik dalam tubuh Golkar (Thohari, 2004). Langkah strategis yang diambil Partai Golkar membangun citra sebagai partai modern, terbuka dan demokratis adalah dengan mengadakan konvensi partai Golkar (Noviato dkk, 2003:185). Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dilakukan Golkar mereformasi dirinya yakni melakukan konversi politik, melakukan reformasi struktur dan kultur politik dalam tubuh Golkar serta menyelenggarakan konvensi partai Golkar. Dengan begitu salah satu kebijakan internal Partai Golkar yang terkait dengan peningkatan citra organisasi adalah penyelenggaraan Konvensi Nasional Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden Partai Golkar yang kemudian disebut Konvensi Nasional Partai Golkar (Tanjung, 2007:292). Gagasan konvensi menjaring calon-calon presiden seluas mungkin yang muncul dalam Partai Golkar, menunjukkan bahwa partai ini

inovatif. Menurut Akbar Tanjung, keputusan tentang diadakannya konvensi Partai Golkar adalah dalam kerangka memberikan kesempatan secara terbuka kepada siapa saja, tokoh-tokoh nasional yang terpanggil untuk menjadi calon presiden (Novianto dkk, 2003). Kebijakan konvensi merupakan kebijakan strategis dan memperlihatkan bahwa Partai Golkar berorientasi ke masa depan yang mengembangkan suatu pembaruan atau reformasi.

Merujuk pada kebijakan serta pendapat pakar hukum, pengamat politik dan peneliti tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden dari Partai Golkar, mengandung beragam makna yakni merupakan inovasi politik diharapkan mampu menjaring calon pemimpin masa depan secara obyektif. Konvensi Partai Golkar merupakan terobosan yang inkonvensional dan *genial* sebagai seleksi yang terbuka dan demokratis (Thohari, 2004). Konvensi Partai Golkar adalah keinginan Partai Golkar memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara

(Suara Karya, 2003). Konvensi Partai Golkar sebagai kontribusi berharga bagi proses pendidikan politik dan kualitas demokrasi (Novianto, 2003). Oleh sebab itu konvensi Partai Golkar telah menimbulkan antusiasme politik yang penuh gairah menjelang Pemilu 2004.

Mengacu pada ide dan tanggapan para ahli tersebut, kemudian dapat menggambarkan beberapa alasan dibalik konvensi 2003 yaitu: *Pertama*, Konvensi diadakan untuk mengalihkan opini masyarakat tentang anggapan bahwa Golkar bagian dari Orde Baru. Bahkan, beberapa kalangan menganggap bahwa konvensi sebagai ide yang kreatif sebagai inovasi politik. Salah satu keberhasilan konvensi adalah munculnya para peserta yang mempunyai latar belakang yang beraneka ragam. *Kedua*, Konvensi memberikan kontribusi bagi Partai Golkar untuk memperoleh dana kampanye. Dengan adanya pelaksanaan konvensi dapat terciptanya desentralisasi keuangan yang membuat para calon ramai-

ramai menyumbang dana ke Golkar. *Ketiga*, Konvensi mampu mempermudah Golkar untuk berkonsolidasi dengan kadernya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kuatnya konsolidasi Golkar untuk mengkondisikan kekuatan politiknya berhasil memenangkan Pemilu 2004. *Keempat*, proses konvensi berhasil menunjukkan bahwa kader partai tidak selalu dominan dalam pemilihan, hal itu ditunjukkan dengan terpilihnya Wiranto dengan latar belakang militer sebagai pemenang konvensi yang notabene bukan kader Partai Golkar. Memang secara formal Wiranto pasca reformasi internal Partai Golkar, bukan kader Golkar, namun secara kultural dan emosional Wiranto pernah menjadi Panglima ABRI sebagai pimpinan Golkar Jalur A (keluarga besar ABRI) pada masa Orde Baru. Dengan begitu kebijakan konvensi menjadi penting dan relevan dilakukan oleh Partai Golkar dimasa kini dan mendatang.

Penetapan konvensi sebagai mekanisme rekrutmen adalah berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Paripurna VI Partai Golkar

No. IV/RAPIM-IV/GOLKAR/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Konvensi Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rapim tersebut, dikelurkan Keputusan Badan Pelaksanaan Konvensi Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar No. 06/Balak Konvensi/Golkar/IX/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konvensi Daerah Provinsi, Pra Konvensi Nasional dan Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar. Dengan menetapkan mekanisme proses seleksi capres secara terbuka dan demokratis di internal partai, pelaksanaan konvensi nasional pemilihan Calon Presiden dari Partai Golkar merupakan terobosan berharga bagi tradisi pemilihan presiden secara langsung.

Riswanda Imawan (Jawapos, 20 Okt 2003) menjelaskan bahwa Partai Golkar mampu membaca isu-isu sentral dalam peta politik Indonesia serta piawai mengelola psikologi politik yang berkembang. Persoalan lain yang muncul dalam pelaksanaan konvensi adalah penundaan jadwal konvensi capres ditunda sampai

selesainya pemilu legislatif. Bila diperhatikan, UU No 23/2003 penundaan tersebut masuk akal. Partai Golkar harus melihat dulu konfigurasi politik yang berkembang sebelum menentukan dengan siapa Partai Golkar harus berkoalisi. Namun, penundaan jadwal tersebut dapat diduga sebagai salah satu strategi dari pihak Akbar itu untuk menunggu vonis MA atas kasasi yang diajukan. Penundaan jadwal konvensi memunculkan polemik

tersendiri baik di internal dan eksternal partai Golkar. Kalau keputusan kasasi membebaskan Akbar dan Akbar menjadi Capres, secara internal partai akan terjadi pergolakan. Para tokoh akan merasa "dikerjain" Akbar. Jika itu yang terjadi, mereka akan memobilisasi pendukungnya untuk tidak memilih Partai Golkar. Bukankah para tokoh yang merasa dikerjain itu sudah mengeluarkan dana besar untuk lolos dalam babak pra konvensi.

## II. STIGMA TENTANG IDE KONVENSI

Ide konvensi muncul sebagai "geliat-geliat" perubahan politik yang muncul dalam partai politik di Indonesia. Tuntutan reformasi di Indonesia yang mengarah pada demokratisasi, menjadikan perubahan yang signifikan dalam proses politik menjelang Pemilu 2004. Partai Golkar yang memiliki kader solid dan organisasi yang mapan memiliki ide baru sebagai salah satu strategi kemenangan Pemilu 2004. Ide baru adalah konvensi calon Presiden yang akan mewakili Partai Golkar sebagai calon Presiden. Ide konvensi membawa dampak yang

bombastis bagi partai Golkar sendiri. Eksploitasi media massa yang terus-menerus yang memberitakan konvensi mengakibatkan keinginan tahuhan masyarakat semakin besar. Apa sebenarnya ide dasar munculnya konvensi calon Presiden tersebut. Hal itu yang menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan.

Teori ide sebagai modal perubahan. Diambil dari tesis Max Weber (dalam Jalaluddin Rakmat, 2000: 47) yang mengatakan bahwa penyebab utama perubahan adalah *ide*. Tesis utama dari Weberianisme

adalah pengakuan terhadap besarnya peran ide yang berubah menjadi ideologi sebagai variable independen bagi perkembangan dan perubahan masyarakat. Pemikiran Weber yang dapat berpengaruh pada teori perubahan sosial. Rasional sebagai salah satu ide gagasan untuk melakukan suatu perubahan sosial. Menurut Weber, “*rationale*” meliputi “*mean*” (alat) yang menjadi sasaran utama dan “*end*” yang meliputi aspek kultural sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang hidup dengan pola pikiran rasional yang ada pada perangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehi-dupannya. Orang rasional akan memilih mana yang paling benar untuk mencapai tujuannya.

Golkar sebagai partai politik yang mapan dan terorganisir dengan baik menggunakan kekuatan politik yang dimiliki untuk kemenangan Pemilu. Dengan ide dan gagasan yang rasional untuk membentuk metode dan strategi kemenangan Pemilu. Salah satu ide itu adalah konvensi calon Presiden Partai Golkar. Alasan yang rasional adalah konvensi calon presiden adalah ide

baru dan pertama kali di Indonesia. Dengan mengadopsi model konvensi ini, partai Golkar dapat mengalahkan partai lain dengan pengembangan momentum opini konvensi secara terus menerus.

Hal ini dijelaskan oleh Weber dalam (Ritzer dan Goodman, 2004, 123-124) bahwa ide dan realitas, general dan partikular, “yang seharusnya” dan “yang adanya” selalu berbeda. Apa “yang adanya” tidak dapat dideduksi dari hukum apapun. Konsep-konsep merupakan instrumen yang sangat diperlukan untuk memahami dunia, dan mereka selalu ditransedensikan oleh pengetahuan yang hanya mengalami kemajuan dengan mentransedensikan mereka. Dengan demikian perlu untuk mendefinisikan secara ketat istilah yang digunakan, bukan untuk mengubah ilmu pengetahuan menjadi sistem tertutup, melainkan untuk membandingkan ide-ide kita dengan realitas. Fungsi tipe ideal adalah untuk menjadikan perbandingan semacam itu memungkinkan dan bermanfaat.

Tipe ideal didefinisikan sebagai sebuah konstruksi mental yang

diperoleh bukan melalui generalisasi ciri-ciri yang lazim bagi setiap individu melainkan dengan rasionalisasi Utopian. Kita menyatakan karakteristik yang kurang lebih nyata dalam keadaan-keadaan yang berbeda, kita menekankan, mengeliminasi, membesar-besarkan dan akhirnya mengganti kekacauan dan inkohereni realitas dengan keutuhan rasional dan koheren. Weber adalah seorang pemikir oposisional. Dia hanya menyatakan secara tidak langsung karakteristik yang lebih detail dan varietas tipe ideal.

Dalam masyarakat, ada pengelompokan berdasarkan kepentingan tertentu yaitu dalam bentuk kelas (pengelompokan berdasarkan ekonomi), status (pengelompokan berdasarkan kondisi dan kepentingan sosial) dan partai (pengelompokan berdasarkan kepentingan politik). Konsep kelas berasal dari kekuatan politik kemudian berkembang menjadi kekuatan ekonomi sebagai kekuatan legitimasi (Salim, 2002: 39).

Golkar dengan ide konvensi Capresnya telah memberikan

kesempatan kepada pengurus dan kader partai untuk melakukan konsolidasi bersama untuk memenangkan Golkar sebagai pemenang Pemilu. Konvensi sebagai ide baru yang akhirnya menjadi salah satu ideologi Golkar untuk memperoleh simpati dari kader dan masyarakat umum. Akibat logis dan dukungan yang diperlukan oleh Weber adalah jagat manusia ditandai secara khas oleh adanya “ideal-ideal yang saling bersaing dan tidak bisa meredakan. Oleh karena itu tidak ada ideal tunggal yang pada titik sejarah manapun bisa dibuktikan sebagai “benar” atau “salah” oleh analisis ilmiah.

Weber menekankan bahwa peran pengurus partai sebagai elit dari sebuah lembaga tidak selamanya dapat bertindak secara independen dan mempromosikan komitmen politik personalnya. Tetapi, peran elit partai dalam hal ini adalah menjalankan tuntutan dari sebuah organisasi yang kaku dan bekerja secara efisien mungkin berdasarkan pada pengetahuan yang terspesialisasi.

Ide Konvensi partai Golkar banyak terinspirasi dari Amerika yang sudah berpengalaman dalam hal berdemokrasi sehingga pelaksanaan konvensi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tanpa konflik yang berkepanjangan yang dapat menghancurkan keutuhan partai. Hal ini berbeda dengan

kondisi di Indonesia, dimana Indonesia masih mengalami transisi menuju demokrasi dan mencari sistem yang ideal. Banyak orang yang mempertanyakan konvensi ini digelar. Konvensi sebagai kendaraan politik yang demokratis yang menyaring aspirasi dari bawah atau hanya akal-akalan elit saja?.

### **III. SUMBER, AKTOR DAN IDE TENTANG KONVENSI**

Sumber-sumber yang mendasari ide konvensi yang berawal dari Undang-Undang Politik Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ide dasar dari Konvensi Capres partai Golkar berawal dari proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan dari UU No. 23 Tahun 2003 bahwa dalam UUD 1945 setelah perubahan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh MPR tetapi dilaksanakan menurut UUD. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilu baik

untuk memilih DPR, DPD dan DPRD maupun memilih Presiden dan wakil Presiden yang semua dilaksanakan menurut UU sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka NKRI.

Dalam pasal 6a UUD 45 pada ayat 1 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan pada ayat 2 dinyatakan pasangan presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilu (Aritonang, 2003: 335).

Selain itu, muncul wacana bahwa ide Konvensi berawal ketika Akbar dirundung masalah hukum

yaitu kasus korupsi dana non budgeter bulog. hal ini membutuhkan legalitas yang berasal dari partai Golkar untuk pencalonan dirinya sebagai presiden merupakan kehendak massa Partai Golkar. Tetapi Akbar akan berpikir kembali bahwa kesempatan ia untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar akan dipermasalahkan oleh banyak kalangan. Karena Akbar Tandjung masih terjerat kasus hukum yang belum tuntas perkaranya di pengadilan. Hal ini akan membuat Akbar Tandjung berpikir kembali untuk membuat strategi lain yang dapat membuat dirinya maju sebagai calon Presiden, selain itu ia ingin membuat wacana politik yang dapat menarik perhatian masyarakat. Akhirnya muncullah ide konvensi calon Presiden Partai Golkar sebagai strategi baru untuk kemenangan partai Golkar dalam Pemilu 2004.

Partai Golkar melakukan terobosan baru yang cukup inkonvensional dalam menentukan calon presidennya yaitu melalui mekanisme konvensi nasional. Melalui konvensi ini, Golkar membuka kesempatan yang luas

melalui mekanisme seleksi yang telat diatur dalam tata tertib konvensi. Selain itu konvensi bertepatan saat ketua umum partai Golkar, Akbar Tanjung sedang memusatkan perhatian pada dua permasalahan yaitu menghadapi kasasi di mahkamah agung atas persoalan hukum tentang dugaan korupsi dan menjalankan amanat partai untuk melakukan konsolidasi ke seluruh daerah dalam rangka membesarkan partai. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Akbar Tandjung tidak bermasalah mustahil ada konvensi Capres Partai Golkar (Thohari, 2004: 29).

Weber dalam (Giddens, 1986, 192-193) mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bahwa seorang pelaku akan mampu untuk mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang lain, dengan siapa dia berada dalam hubungan sosial. Definisi ini menjadi luas dengan artian bahwa tiap jenis hubungan sosial dan politik memiliki tingkatan pada kondisi tertentu yang berkorelasi dengan kekuasaan.

Langkah Golkar pun memberikan peluang bagi

dicalonkannya calon nonpartai sebagai calon presiden pada Pemilu mendatang. "Kecenderungan kita selama ini adalah ketua umum partai sekaligus menjadi calon presiden atau calon pimpinan daerah untuk pimpinan partai di tingkat daerah." Kemungkinan Golkar tidak mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden, selain karena memang kondisi Akbar Tandjung yang tidak memungkinkan, akan membuka peluang dukungan publik bagi Golkar. Apalagi, kalau Golkar tidak mencalonkan kader atau fungsionaris partainya.

Konvensi memberikan kesempatan pada siapa saja yang masih percaya pada kedigdayaan politik sebagai jalur perjuangan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis untuk mengikuti proses seleksi secara terbuka dan demokratis yang berpuncak pada tanggal 20 Maret 2004. Dengan merebut suara setengah plus satu dari 534 suara yang dimiliki oleh DPP, DPD I, DPD II, dan Ormas-ormas pendiri maka pada konvensi ini akan muncul satu-satunya capres yang akan mewakili Golkar.

Ide Golkar untuk tidak mencalonkan ketua umumnya sebagai calon presiden dapat diikuti partai lain, karena ide tersebut amat baik. Artinya, jika partai berani untuk tidak mencalonkan ketua umumnya sebagai presiden, terbuka peluang bagi putra terbaik bangsa ini tampil sebagai pimpinan nasional, walaupun dia tidak berpartai. Selama ini yang terjadi partai cenderung mengedepankan kepentingannya dengan memaksakan ketua umumnya menjadi calon presiden, ketua lembaga negara, atau di tingkat daerah ketua cabang partai dipaksakan menjadi Gubernur, Walikota, atau Bupati. Dengan memunculkan wacana akan mencalonkan bukan ketua umumnya sebagai presiden, Golkar tampaknya menyadari pula kalau masih kuat posisinya, tetapi ketua umumnya tidak mungkin dicalonkan. Kalau Golkar berani mencalonkan tokoh nonpartisan, rakyat kemungkinan akan mendukung.

Rasionalisasi Weber (dalam Wrong, 2003: 39) adalah proses yang melalui aturan-aturan dan prosedur yang eksplisit, abstrak, dan bisa

dikalkulasi secara intelek makin mengantikan sentimen, tradisi dan petunjuk praktis dalam semua bidang aktivitas.

Rasionalisasi menginstrumentalisasikan kehidupan. Bagi Weber, teknik dan struktur sosial yang diciptakan oleh dan mengekspresikan rasionalitas serta penguasaan manusia atas lingkungannya menjadi proses pertahanan diri. Masyarakat tidak lagi tergantung pada rasionalitas yang menciptakan mereka tetapi sebenarnya menghalangi dan menyusutkan kemampuan rasional orang-orang yang mereka dominasi.

Penyebaran bentuk-bentuk organisasi sosial birokratis hirarkis menjadi contoh tentang proses rasionalisasi dalam bidang struktur sosial, yang terdiri dalam realisasi yang sama dan kehidupan sosial sebagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, sekulerisme, dan formalisme legal berdiri terhadap bidang-bidang budaya masing-masing mereka. Birokrasi adalah manifestasi sosiologis yang distingtif dari proses rasionalisasi.

Kekuatan ide konvensi ini menarik untuk dilihat secara kritis

berkenaan dengan begitu langkanya ide partai lain yang muncul dalam Pemilu 2004. Karena itu, analisa ide sebagai modal kekuatan politik akan tepat dijadikan sebagai pisau analisa seberapa jauh ide konvensi lahir, berpengaruh dan menemukan kekuatannya dalam memenangkan partai Golkar dalam Pemilu. Ide memunculkan konsep-konsep baru yang berorientasi pada paradigma baru dan meninggalkan paradigma yang lama.

Di lain hal, partai politik sebagai *ide*, merupakan bagian dari kekuatan politik, yang salah satu fungsinya adalah mencari pemimpin yang mampu *merealisasikan idenya* [visi misi] sehingga punya legitimasi dan bisa diterima oleh masyarakat. Sayangnya banyak partai politik belum bisa memunculkan figur pemimpin yang kaya ide hingga dapat membawa bangsa Indonesia menuju perbaikan-perbaikan yang signifikan.

Di sinilah pentingnya ide dan gagasan. Keduanya akan menghasilkan keserasian antara individu dan organisasi. Hal ini akan mempermudah pencapaian

kepentingan yang diinginkan bersama. Lahirlah hubungan yang harmonis hingga memunculkan kepentingan bersama di atas segalanya. Ide konvensi merupakan terobosan terbaru dari Partai Golkar dan pertama kali diadakan di Indonesia. Selama ini partai-partai politik melakukan pemilihan ketua umum partai berdasarkan atas kultur figure dan profil seseorang yang kharismatik dan mempunyai massa

#### IV. PENUTUP

Partai Golkar memunculkan ide konvensi dengan dinamika-dinamika yang beraneka ragam. Dinamika internal, konvensi sebagai bagian dari strategi Golkar untuk memenangkan Pemilu 2004. Sedangkan dinamika eksternalnya untuk merubah paradigma partai Golkar yang identik dengan Orde Baru menjadi partai Golkar Baru dengan paradigma barunya. Perubahan strategi Golkar yang berbeda dengan partai lain, memunculkan harapan-harapan baru dalam masyarakat yang menginginkan perubahan yang drastis. Masyarakat juga

tetapi tidak melihat akuntabilitas dan kredibilitasnya. Karena itu, konvensi lahir dimaksudkan sebagai sarana dan wahana bagi proses seleksi calon presiden dari partai Golkar yang membawa pola berbeda. Hal ini karena peserta konvensi dengan ragam latar belakang berbeda bisa ikut serta sepanjang diterima secara prosedural dan substansial oleh Partai Golkar.

menginginkan ide konvensi ini dapat ditiru oleh partai politik lain. Konsep konvensi yang demokratis dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembelajaran politik yang lebih demokratis dan berkredibilitas tinggi.

Langkah strategis yang diambil Partai Golkar agar tetap eksis dan *survive* adalah melakukan reformasi internal dengan melakukan reformasi struktur dan kultur politik dalam tubuh Golkar (Thohari, 2004). Langkah strategis yang diambil Partai Golkar membangun citra sebagai partai modern, terbuka dan demokratis adalah dengan

mengadakan konvensi partai Golkar (Noviato dkk, 2003:185). Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dilakukan Golkar mereformasi dirinya yakni melakukan konvensi politik, melakukan reformasi struktur dan kultur politik dalam tubuh Golkar serta menyelenggarakan konvensi partai Golkar. Dengan begitu salah satu kebijakan internal Partai Golkar yang terkait dengan peningkatan citra organisasi adalah penyelenggaraan Konvensi Nasional Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden Partai Golkar yang kemudian disebut Konvensi Nasional Partai Golkar (Tanjung, 2007:292). Gagasan konvensi menjaring calon-calon presiden seluas mungkin yang muncul dalam Partai Golkar, menunjukkan bahwa partai ini inovatif. Menurut Akbar Tanjung, keputusan tentang diadakannya konvensi Partai Golkar adalah dalam kerangka memberikan kesempatan secara terbuka kepada siapa saja, tokoh-tokoh nasional yang terpanggil untuk menjadi calon presiden (Novianto dkk, 2003). Kebijakan konvensi merupakan kebijakan strategis dan memperlihatkan bahwa

Partai Golkar berorientasi kemasa depan yang mengembangkan suatu pembaruan atau reformasi. Demikian pula pakar Hukum Sri Sumantri (dalam Novianto, 2003) berpendapat bahwa diberikannya peluang kalangan independen diluar partai politik untuk ikut konvensi adalah merupakan langkah maju.

Konvensi Partai Golkar merupakan kebijakan yang inovatif dan sejalan dengan cita-cita reformasi terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang terbuka dan demokratis (Tanjung, 2007). Konvensi Partai Golkar sebagai sebuah kebijakan akan memiliki makna bagi organisasi Golkar maupun bagi publik, apabila terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan Soenarko (2000:185) yang mengatakan bahwa suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan (*adopted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (*direncanakan*) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang

senyatanya dicapai (sebagai hasil prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Gejala inilah yang oleh Andrew Dunsire (1978) dinamakan sebagai *implementation gap*. Gap tersebut sedikit banyak tergantung pada apa yang oleh Wakter Williams (1975) disebut sebagai *implemation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam mengantisipasi kegagalan kebijakan, Hogwood & Gunn (1986), membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Mengenai resiko kegagalan kebijakan, menurut Wahab (1997) adalah disebabkan oleh faktor pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri yang memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).

Menurut Weber (dalam Santoso, 1993: 17) birokrasi merupakan unsur

terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Organisasi tidak lebih merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu perhatiannya lebih tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur itu.

Birokrasi partai Golkar mempunyai peran yang besar dalam menjalankan segala kebijakan yang telah dibuat oleh partai. Salah satu bagian dari birokrasi adalah pengurus partai. Pengurus Golkar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konvensi Capres sebaik mungkin. Pengurus partai harus dapat membuat tata tertib dan peraturan konvensi yang jelas dan kredibel. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan strategi Konvensi.

Konsep yang dikembangkan oleh partai Golkar dalam konvensi ini merupakan hal baru di Indonesia. Hal ini berbeda dengan partai-partai lain Indonesia yang lebih cenderung mengandalkan ketua umum partainya sebagai calon Presiden. Konvensi dipakai sebagai strategi partai Golkar dalam usaha memperbaiki nama baiknya serta sebagai strategi

pemenangan Pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan momentum yang menentukan bagi Partai Golkar untuk memperkuat eksistensinya melalui dukungan rakyat. Pemilu itu akan menguji dukungan dan sikap masyarakat terhadap Partai Golkar. Keberadaan partai dalam negara demokrasi ditentukan oleh masyarakat.

Model rekrutmen yang dikembangkan Partai Golkar saat ini sebenarnya mengarah pada pencarian seorang pemimpin yang punya hak inisiatif tinggi. Mekanisme yang dimunculkan juga akan melahirkan seorang pemimpin yang tidak bergantung pada partai politiknya. Tidak memerlukan restu pemimpin partai. ketika mekanisme *recall* anggota legislatif dihidupkan. Mereka takut sekali kepada pemimpin partai. Kalau konvensi ini berhasil, ini adalah terobosan yang tidak pernah terjadi. Partai hanya timbul dalam kelompok yang mempunyai ciri asosiasional dengan adanya rasional dan orang-orang yang menerapkan aturan-aturan. Dalam suatu masyarakat demokratis, timbul peluang adanya birokratisasi.

Hubungan sosial bersifat terbuka, sepanjang sistem yang ada dapat berpartisipasi pihak-pihak diluar kelompok yang bersangkutan dalam posisi tertentu. Hubungan sosial tertutup, terjadi juga sebaliknya (Giddens dan David Held, 1987: 27).

Golongan karya yang kemudian berubah menjadi partai Golkar untuk mengikuti Pemilu 1999. partai Golkar ingin merubah image dengan penampilan baru sebagai partai politik. Perubahan ini tidak lepas dari usaha-usaha dan strategi partai Golkar untuk memenangkan kembali setiap Pemilu. Segala usaha akan dilakukan untuk memperoleh kemenangan dengan memperbaiki strategi yang ada dan melakukan inovasi terhadap ide dan gagasan yang ada. Salah satu ide atau gagasan strategi Golkar adalah ide konvensi calon presiden.

Ide tentang konvensi capres Golkar merupakan usaha mensosialisasikan paradigma baru. Ide konvensi berhasil mengalihkan opini masyarakat yang masih menganggap bahwa Golkar bagian dari Orde Baru. Bahkan, beberapa kalangan menganggap bahwa

konvensi sebagai ide yang gila tapi realitanya kemudian merubah opini yang kontradiktif tersebut. Salah satu keberhasilan konvensi adalah munculnya para peserta yang mempunyai latar belakang beraneka ragam dari militer, birokrasi, pengusaha dan politisi. Konvensi mampu menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan menggaet para peserta konvensi untuk berjuang bersama memajukan Partai Golkar.

Menurut Lippmann (1998:242) pandangan-pandangan individu/pribadi terhadap perkembangan akan tergantung pada bagaimana kita mengambil sikap kritis atas cara penyusunan opini. Sebab opini yang sederhana, sebagai produk kontak sepihak, tradisi dan kepentingan pribadi pada hakekatnya tidak dapat diterima begitu saja sebagai metode pemikiran politik yang berdasarkan atas data, ukuran analisis dan perbandingan yang tepat.

Opini tentang konvensi menjadi bahan diskusi banyak kalangan. Hal itu tidak lepas dari opini yang tersusun dengan rapi serta terstruktur yang baik. Konvensi sebagai ide baru dan pertama di Indonesia untuk

memilih calon Presiden dari partai politik. Selain itu, ide konvensi sebagai salah satu strategi jitu untuk mengalihkan opini yang selama ini menganggap bahwa Partai Golkar identik dengan Orde Baru.

Partai Golkar dengan ide konvensi berhasil mengebrak perpolitikan di Indonesia. Golkar muncul sebagai inovator yang mempunyai ide cemerlang dalam pemilihan calon presiden. Golkar mencoba menghilangkan stigma yang muncul karena masih dianggap sebagai bayang-bayang Orde Baru. Harapan-harapan yang muncul dari ide konvensi ini adalah akuntabilitas kinerja mengenai pelaksanaan konvensi itu sendiri agar tidak memunculkan praduga bahwa ide konvensi hanya sekedar akal-akalan dari Golkar untuk mendongkrak suara dalam Pemilu Legislatif.

Konvensi capres Partai Golkar ternyata banyak diminati oleh kalangan. Konvensi membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. Konvensi diikuti oleh 19 kontestan yang kemudian akan maju dalam pra konvensi. Salah satu keberhasilan konvensi adalah munculnya para

peserta yang mempunyai latar belakang yang beraneka ragam mulai Wiranto dan Prabowo dari militer, Jusuf Kalla dari birokrasi, Aburizal Bakrie dari pengusaha dan Akbar Tandjung dari politisi serta Nurcholish Madjid yang kemudian mengundurkan diri dengan beberapa alasan. Kesepahaman dan kesepakatan yang terbentuk berhasil menggaet para peserta konvensi untuk berjuang bersama memajukan Partai Golkar. Dengan beranekaragam profesi dan kepentingan menunjukkan bahwa ide Konvensi Capres berhasil menguatkan Partai Golkar untuk bertarung dalam Pemilu 2004.

Mengutip dari bulletin Pokja EKKU DPP Golkar (2003, 2) diketahuib ahwa respon dan antusiasme masyarakat terhadap konvensi sebagai ide baru yang berorientasi pada demokratisasi. Hal ini ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya kalangan yang mendaftar menjadi peserta konvensi. hal ini menunjukkan bahwa ide konvensi berhasil dan dapat menguatkan kekuatan Partai untuk memenangkan Pemilu 2004. Jumlah peserta yang

yang lolos disekretariat konvensi mencapai 19 orang dengan beraneka ragam profesi mulai dari kalangan politisi, menteri kabinet, purnawirawan tentara, cendekiawan, tokoh wanita, pengusaha, artis dan budayawan. Hal ini berita mengembirakan karena mengindikasikan begitu besar animo berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam konvensi untuk tampil sebagai kandidat Presiden dari partai Golkar.

Akhirnya setelah verifikasi, yang lolos untuk mengikuti konvensi nasional berjumlah 7 orang. Peserta yang lolos konvensi nasional adalah Wiranto dan Prabowo Subianto yang mewakili Militer, Akbar Tandjung dari jalur Politisi, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh dari kelompok pengusaha dan Jusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili Birokrasi.

Di sisi yang lain, orang-orang Golkar ragu konvensi dapat menjadi alat untuk membangun kebersamaan mereka. Ada kekhawatiran bahwa konvensi hanya dijadikan alat oleh orang-orang untuk mengejar kekuasaan. Dalam sosialisasi visi dan

misi dari para calon terungkap kekhawatiran itu. Kader-kader Golkar menangkap kesan bahwa para calon yang tidak terpilih dalam konvensi tetap akan maju dalam pemilihan presiden dengan menggunakan kendaraan yang lain, pindah ke partai yang lain.

Untuk menguji loyalitas para calon itulah para kader meminta agar penetapan satu calon presiden dari Golkar ditetapkan sesudah Pemilu legislatif. Dengan demikian, para calon itu diminta untuk memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan partai dalam Pemilu 2004. Kekhawatiran kader Golkar itu tentunya wajar saja. Mereka juga berhak untuk ragu dengan kaderisasi yang ada dalam tubuh partai Golkar. Bagaimana loyalitas kader Golkar sehingga partai hanya dijadikan alat bagi kepentingan pribadi, bukan alat perjuangan anggota maupun partai. Padahal Golkar dinilai sebagai partai yang paling solid dan organisasi yang mapan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Baharuddin dan Muslim Hutasuhut (editor), *Undang-Undang Politik 2003*, DPP

Konvensi Calon Presiden Partai Golkar sebagai strategi politik Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif yang ditandai dengan beberapa alasan menggelar konvensi. *Pertama* adalah untuk mengalihkan perhatian publik terhadap isu korupsi yang menerpa ketua umumnya. *Kedua*, terciptanya desentralisasi keuangan yang membuat para calon presiden yang berminat maju melalui Partai Golkar untuk menyumbang dana Pemilu. *Ketiga*, kesempatan bagi calon Presiden yang mendaftar Konvensi Calon Presiden untuk berjuang memenangkan Partai Golkar dan menarik simpati basis massa pendukung. *Keempat*, konvensi juga bisa menggerakkan dinamika di tubuh Golkar sendiri untuk melakukan kondolidasi baik ke luar maupun ke dalam Partai. Hal ini membuat Golkar menjadi partai yang paling terkonsolidasi.

Golkar dan Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2003.

- Bulletin POKJA EKKU, *Dari Konvensi Menuju Presiden RI*, DPP Golkar, Jakarta.
- Denis Wrong (ed), *Max Weber; Sebuah Kahazanah*, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2003.
- Dhakidae, Daniel, *Partai-partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004-2009*, Kompas, Jakarta, 2004.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya-Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Giddens, Anthony dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Hajriyanto Y. Thohari, *Pasca Konversi Kini Konvensi; esei-esei politik tentang Golkar*, Hajriyanto Center, Karang Anyar, 2004.
- Huntington, Samuel P., *Tertib Politik; Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Imawan, Riswandha, *Madu atau Racun; Menyimak Konvensi Golkar*, Jawapos, Senin, 20 Okt 2003.
- J. Kristiadi, *Panitia Konvensi Akui ada Perbedaan Visi dan Misi dengan Cak Nur*, Kompas, 31 Juli 2003.
- Lippmann, Walter, *Opini Umum*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Ralph Schroeder, *Max Weber; Tentang Hegemoni Sistem kepercayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (edisi keenam)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Riswandha Imawan, *Madu atau Racun; Menyimak Konvensi Golkar*, Jawapos, Senin, 20 Okt 2003.
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Yogja, 2002.